

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KASUS  
KEKERASAN SEKSUAL PADA MAHASISWI YANG DILAKUKAN  
OKNUM DOSEN DI KABUPATEN BULELENG  
(STUDI PUTUSAN: Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)**

**Oleh  
Gede Maheru Teja Yasa, NIM 2014101142  
Program Studi Ilmu Hukum**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mempelajari dan menjelaskan bagaimana penegak hukum, yaitu Polres Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja, menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen di Kabupaten Buleleng; dan (2) untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum tersebut dalam menyelesaikan kasus ini. Penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif ini dilakukan di Kepolisian Kabupaten Buleleng, Kejaksaan Negeri Buleleng, dan Pengadilan Negeri Singaraja. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen, observasi, dan wawancara. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive bersama dengan teknik *non-probability sampling*. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa (1) dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh seorang dosen terhadap mahasiswa, dilakukan penahanan terhadap tersangka, penerapan UU TPKS khususnya pasal 6 huruf C, serta penegakan hukum melalui putusan pengadilan negeri. (2) Dalam kasus perkara Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr, penegak hukum menghadapi berbagai kendala seperti kekurangan personel di Polres Buleleng, di mana hanya terdapat satu anggota polwan, sehingga proses pelimpahan perkara dan juga berkas ke Kejaksaan membutuhkan waktu yang lama. Kejaksaan Negeri Buleleng juga menghadapi kesulitan dalam proses restitusi yang diajukan ke MPSK karena penahanan hampir selesai sementara proses hukum masih berlangsung. Di Pengadilan Negeri Singaraja, hakim mengalami kesulitan selama persidangan karena korban meminta terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang. Selain itu, media massa menganggap keputusan hakim tidak objektif dan tidak netral karena putusannya lebih rendah dari tuntutan JPU.

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Aparat Penegak Hukum, Kabupaten Buleleng.

**LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL CASES OF SEXUAL VIOLENCE  
AGAINST FEMALE STUDENTS COMMITTED BY A LECTURER IN  
BULELENG REGENCY**

**(CASE STUDY: Number 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr)**

**By**

**Gede Maheru Teja Yasa, NIM 2014101142**

**Law Studies Program**

**ABSTRACT**

*The objectives of this study are (1) to examine and explain how law enforcement agencies, namely the Buleleng District Police, the Buleleng District Attorney's Office, and the Singaraja District Court, handle cases of sexual violence committed by a lecturer in Buleleng Regency; and (2) to identify the obstacles faced by these law enforcement agencies in resolving the case. This empirical legal research, using a descriptive approach, was conducted at the Buleleng District Police, the Buleleng District Attorney's Office, and the Singaraja District Court. The data sources included primary and secondary data, consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection techniques involved document study, observation, and interviews. The sampling was done purposively along with non-probability sampling techniques. The data obtained were then processed and analyzed descriptively and qualitatively. The study found that (1) in handling the case of sexual violence by a lecturer against a student, the suspect was detained, the TPKS Law, particularly Article 6 letter C, was applied, and legal enforcement was carried out through the district court's verdict. (2) In the case Number 94/Pid.Sus/2023/PN Sgr, law enforcement faced various challenges, such as a shortage of personnel at the Buleleng District Police, where there was only one female police officer, causing delays in returning the case to the Attorney's Office. The Buleleng District Attorney's Office also encountered difficulties in the restitution process submitted to MPSK because the detention was nearly complete while the legal process was still ongoing. In the Singaraja District Court, judges faced issues during the trial as the victim requested the defendant be removed from the courtroom. Additionally, the mass media perceived the judge's decision as biased and not neutral since the verdict was lower than the prosecutor's demands.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Sexual Violence Crime, Law Enforcement Officers, Buleleng Regency*